

Dibuka oleh Ibu Rini (Deputi Kelembagaan Menpan)

1. Jumat ini direncanakan ada rapat oleh pak presiden, maka diharapkan ada usulan finalisasi terhadap perpres Badan Siber
2. Untuk inspektorat tidak bisa menjadi inspektorat utama, hanya inspektorat saja
3. Untuk nama akan mengajukan 2 nama badan siber
4. Substansi perpres yang akan menjadi pokok2 yang akan disampaikan kpd preiden
5. Akan mengajukan lgsg yg 4 deputi kepada presiden
6. Ini adalah konsep yg sdh $\frac{3}{4}$ matang
7. Ditetapkan utk kepalan badan siber agar diisi oleh jabatan negeri
8. LPNK dibawah menteri
9. Pasal 47 masukan lemsaneg dpt di masukkn ke dalam substansi
10. Untuk Pasal 12 lebih baik mengambil masukan lemsaneg
11. Organisasi bs brdrkn fungsi dan substansi (objek)
12. Terhadap substansi jg ada kelemahannya, ditakutkan tidak bisa mengakomodir perubahan baru
13. Usulan dua2nya ada kelemahan, namun brdrskn kesepakatan yg dipakai adalah substansi
14. Pada dasarnya lbh bagus diambil dr bisnis proses
15. Awal agustus hrs sdh selesai, soalnya pak presiden mo jelong2
16. Pasal 4 menjadi Deputi pemantauan dan pengendalian
17. Pasal 47 memakai usulan lemsaneg
18. Dari aspek kelembagaan yang mengatur kelembagaan utk tidak menyebutkan nama kelembagaan dan nama menterinya. Dikhawatirkan apabila terjadi perubahan dpt mengakomodir
19. Dalam perpres ini harus di state keamanan utk PPNSnya sendiri
20. Untuk IDSIRTII sepenuhnya akan masuk ke dalam badan siber
21. Terdapat sedikit beberapa perubahan di dalam fungsi aptika khususnya di keamanan informasi, yang masih ada fungsinya dalah fungsi regulator, utk pelaksanaanny pindah ke badan siber
22. Tugas dan fungsi sekretariat dan inspektorat adalah baku

Pk Hastori :

- 1.

Lemsaneg (tim teknisnya) :

1. Trhdp revitalisasi kelembagaan
2. Pasal 46 (4), merujuk dr pasal 44 dinilai bahwa jabatan pimpinan tinggi utama tidak usah.
3. Terkait PAsal 12 dr dotrin ttg pertahanan dan keamanan siber. Sblm trjdnya ancaman hrs db terdeteksi dan teridentifikasi, kedua (sistem hrs diproteksi, prlu adanya perlindungan dan pemulihan infrastruktur),
- 4.

Deputi SDM :

1. Apabila menghindari swasta utk P3K tidak bisa masuk,

Pak aidil:

1. Merurtu hemat, deputi nendasarkan proyek bkn brdrskn fungsi

2. Setiap bisnis proses di deputi saling berhubungan
3. Fungsi proteksi yg diberikan, bkn objek

Untuk penyidikan di kaminfo apabila terjadi pemindahan fungsi,